

Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat: Ketahanan Komunitas dalam Menghadapi MIFEE dan Kebijakan Konservasi di Merauke

Robertus Pecamuya

Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

*Email Korespondensi: robertuspecamuya30@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 18-06-2025
Disetujui 19-06-2025
Diterbitkan 22-06-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the transformation of indigenous peoples' governance in facing the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) and conservation policies, identify community resilience strategies as adaptations to these policies, and provide relevant policy recommendations for sustainable development based on local wisdom. A qualitative approach with a case study design was used to explore local dynamics in Jagebob District, Merauke Regency, South Papua. Data were collected through in-depth interviews with 18 key informants, participant observation, and document studies, then analyzed using thematic analysis techniques. The results showed that indigenous peoples experienced significant transformations in governance, characterized by strengthening customary institutions, revitalizing community deliberations, and integrating traditional values with modern governance practices. Community resilience strategies include livelihood diversification, policy advocacy, and strengthening cultural identity as a form of adaptation and non-violent resistance. Supporting factors include the role of customary leaders, the younger generation, NGOs, and technology; while obstacles include power imbalances, weak law enforcement, and community fragmentation. These findings underscore the urgency of more inclusive development and conservation policies, recognizing indigenous governance as an equal partner, and strengthening local institutional capacity to support sustainable development.

Keywords: Governance; Indigenous peoples; Community resilience; Sustainable development; Conservation policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola masyarakat adat dalam menghadapi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan kebijakan konservasi, mengidentifikasi strategi ketahanan komunitas sebagai adaptasi terhadap kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali dinamika lokal di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat mengalami transformasi signifikan dalam tata kelola, yang ditandai dengan penguatan lembaga adat, revitalisasi musyawarah komunitas, dan integrasi nilai tradisional dengan praktik tata kelola modern. Strategi ketahanan komunitas meliputi diversifikasi penghidupan, advokasi kebijakan, dan penguatan identitas budaya sebagai

bentuk adaptasi dan perlawanan non-kekerasan. Faktor pendukung meliputi peran tokoh adat, generasi muda, LSM, dan teknologi; sedangkan hambatan mencakup ketimpangan kekuatan, lemahnya penegakan hukum, dan fragmentasi komunitas. Temuan ini menegaskan urgensi kebijakan pembangunan dan konservasi yang lebih inklusif, mengakui tata kelola adat sebagai mitra sejajar, dan memperkuat kapasitas kelembagaan lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tata Kelola; Masyarakat adat; Ketahanan komunitas; Pembangunan berkelanjutan; Kebijakan konservasi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pecamuya, R. (2025). Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat: Ketahanan Komunitas dalam Menghadapi MIFEE dan Kebijakan Konservasi di Merauke. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1343-1355. <https://doi.org/10.63822/atkh3972>

PENDAHULUAN

Merauke memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, terutama sebagai wilayah perbatasan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki luas wilayah yang signifikan. Kawasan ini tidak hanya menjadi fokus pengembangan ekonomi nasional melalui berbagai program strategis, tetapi juga menjadi perhatian dalam kebijakan konservasi yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah timur Indonesia. Letak geografis Merauke yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan karakteristik ekologisnya yang unik menjadikan wilayah ini sebagai titik penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam kerangka pembangunan nasional, Merauke sering dikonstruksikan sebagai lumbung pangan masa depan, tetapi di sisi lain, wilayah ini juga merupakan benteng terakhir berbagai ekosistem alami yang mendukung kehidupan masyarakat adat (Fenetiruma et al., 2022).

Salah satu program pembangunan berskala besar yang diterapkan di Merauke adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) (McDonnell, 2022), sebuah proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan dan energi Indonesia. MIFEE bertujuan untuk mengembangkan kawasan pertanian dan perkebunan modern melalui pemanfaatan lahan berskala luas, dengan target peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, tebu, dan bioenergi. Namun, implementasi program ini tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap wilayah adat dan lingkungan. Lahan-lahan yang selama ini dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat adat telah mengalami konversi untuk kepentingan korporasi agribisnis, yang memicu konflik sosial, degradasi lingkungan, dan perubahan pola hidup masyarakat lokal. Ketimpangan dalam distribusi manfaat serta lemahnya perlindungan hak-hak adat semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi komunitas setempat (Maulana & Hutagalung, 2025).

Selain tekanan dari proyek agribisnis berskala besar seperti MIFEE, Merauke juga menjadi lokasi prioritas berbagai kebijakan konservasi. Kebijakan ini meliputi penetapan kawasan konservasi alam dan hutan lindung yang mencakup sebagian besar wilayah adat. Upaya konservasi tersebut di satu sisi bertujuan menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis wilayah, tetapi di sisi lain kerap menimbulkan pembatasan akses masyarakat adat terhadap ruang hidup dan sumber daya yang menjadi basis ekonomi tradisional mereka. Paradoks ini menempatkan masyarakat adat pada posisi yang sulit, karena dihadapkan pada dua arus kebijakan yang sama-sama membatasi otonomi mereka (Tryatmoko, 2012), ekspansi agribisnis yang mengkomersialisasi ruang hidup dan kebijakan konservasi yang membatasi pemanfaatan sumber daya lokal.

Dualitas kebijakan antara ekspansi agribisnis dan konservasi lingkungan telah menimbulkan tantangan serius bagi masyarakat adat di Merauke (Rumkabu et al., 2023). Masyarakat harus berjuang untuk mempertahankan ruang hidup, identitas budaya, dan sistem ekonomi tradisional di tengah tekanan eksternal yang terus meningkat. Benturan nilai dan kepentingan yang muncul sering kali berujung pada konflik horizontal maupun vertikal, serta memperlemah struktur sosial internal masyarakat adat (Tryatmoko, 2012). Pada saat yang sama, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menambah kompleksitas persoalan yang dihadapi. Dalam konteks tersebut, tata kelola komunitas adat menjadi elemen krusial untuk memastikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat Merauke. Transformasi tata kelola diperlukan untuk memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi berbagai tekanan kebijakan dan perubahan lingkungan (Purnomo et al., 2024). Tata kelola yang berbasis kearifan lokal, adaptif terhadap perubahan, serta didukung oleh solidaritas sosial dan kelembagaan adat yang kuat akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan wilayah adat (Dagani, 2024). Kajian mengenai dinamika tata kelola ini tidak hanya relevan dalam konteks

Merauke, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi literatur global tentang ketahanan komunitas adat di era pembangunan dan konservasi.

Transformasi tata kelola masyarakat adat di Merauke mencerminkan respons kolektif terhadap tekanan eksternal yang datang bersamaan dari program MIFEE dan kebijakan konservasi. Perubahan pola pengelolaan wilayah adat tampak dalam upaya komunitas untuk memperkuat mekanisme internal, mulai dari revitalisasi lembaga adat hingga penyusunan kembali norma pengelolaan sumber daya (Eko et al., 2014). Lembaga adat memegang peranan penting sebagai wadah musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif yang menjembatani kepentingan komunitas dengan pihak eksternal, baik pemerintah maupun korporasi. Adaptasi nilai-nilai tradisional, seperti prinsip gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan terhadap tanah leluhur, menjadi landasan dalam mempertahankan identitas budaya sekaligus menegosiasikan posisi dalam konteks pembangunan modern. Studi mengenai transformasi tata kelola ini penting untuk memperkuat literatur akademik tentang bagaimana masyarakat adat di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah konflik kepentingan pembangunan dan konservasi, membangun ketahanan komunitasnya melalui mekanisme berbasis kearifan lokal.

Kajian tentang masyarakat adat Merauke selama ini sebagian besar terfokus pada dampak ekologis dan ekonomi akibat program MIFEE serta kebijakan konservasi, namun belum banyak menggali secara mendalam dinamika internal masyarakat dalam beradaptasi dengan kedua kebijakan tersebut secara simultan. Dimensi tata kelola komunitas, strategi bertahan, dan transformasi nilai-nilai sosial budaya kerap terpinggirkan dalam analisis, sehingga menyisakan ruang kosong dalam pemahaman menyeluruh atas fenomena ini (Van Kerkhoff & Pilbeam, 2017). Padahal, tata kelola berbasis komunitas merupakan kunci dalam menjelaskan bagaimana masyarakat adat menghadapi kompleksitas kebijakan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan perspektif holistik yang tidak hanya menyoroti aspek ekologis dan ekonomi, tetapi juga menghubungkan tata kelola, ketahanan komunitas, dan kebijakan publik dalam satu kerangka analisis terpadu. Studi ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam transformasi tata kelola untuk mempertahankan keberlanjutan ruang hidup mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk transformasi tata kelola masyarakat adat dalam menghadapi MIFEE dan kebijakan konservasi, mengidentifikasi strategi ketahanan komunitas sebagai adaptasi terhadap kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika transformasi tata kelola masyarakat adat dan strategi ketahanan komunitas dalam merespons program MIFEE dan kebijakan konservasi di Merauke. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap proses, makna, dan konteks lokal yang kompleks melalui pemahaman langsung dari pengalaman dan perspektif masyarakat adat. Lokasi penelitian ini difokuskan di wilayah adat yang berada di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Distrik Jagebob dipilih karena merupakan salah satu kawasan yang terdampak langsung oleh implementasi program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan kebijakan konservasi, sehingga menjadi representasi penting dalam melihat dinamika transformasi tata kelola masyarakat adat. Wilayah ini juga menjadi lokasi interaksi intensif antara kepentingan pembangunan pangan skala besar, pelestarian lingkungan, dan upaya masyarakat adat dalam mempertahankan kearifan lokal serta ketahanan komunitas.

Subjek penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung maupun memiliki kepentingan terhadap transformasi tata kelola masyarakat adat dalam menghadapi MIFEE dan kebijakan konservasi, dengan fokus di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Informan dipilih secara purposive agar sesuai dengan tujuan penelitian dan relevan dengan konteks lokal. Informan utama meliputi 5 orang pemimpin adat dan tokoh komunitas dari wilayah adat yang terdampak, 3 perwakilan lembaga adat dan kelembagaan lokal yang berperan dalam pengambilan keputusan komunitas, 3 aparat pemerintah yang mewakili dinas kehutanan, pertanian, dan lingkungan hidup, 2 perwakilan perusahaan pelaksana MIFEE yang aktif di wilayah Jagebob, 3 anggota LSM atau organisasi pendamping masyarakat yang mendampingi masyarakat adat dalam advokasi dan penguatan kapasitas, serta 2 akademisi atau peneliti lokal yang memahami dinamika pembangunan dan konservasi di Merauke. Jumlah keseluruhan subjek penelitian adalah 18 informan kunci yang diharapkan dapat memberikan data mendalam dan komprehensif terkait fokus penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan tiga teknik utama untuk memperoleh informasi yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, wawancara mendalam dilaksanakan terhadap informan kunci yang telah dipilih secara purposive, termasuk pemimpin adat, tokoh komunitas, perwakilan lembaga adat, aparat pemerintah, pihak perusahaan pelaksana MIFEE, anggota LSM, serta akademisi lokal. Wawancara ini bertujuan untuk menggali secara rinci pengalaman, perspektif, dan dinamika transformasi tata kelola yang terjadi di masyarakat adat Distrik Jagebob dalam merespons kebijakan MIFEE dan konservasi. Pertanyaan disusun secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel mengikuti alur informasi dari informan dan memungkinkan eksplorasi isu-isu yang relevan muncul secara alami.

Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas masyarakat adat, seperti pertemuan adat, musyawarah komunitas, kegiatan pengelolaan lahan, serta upaya-upaya adaptasi terhadap kebijakan pembangunan dan konservasi. Observasi ini difokuskan untuk mencatat pola interaksi, proses pengambilan keputusan, mekanisme pengelolaan sumber daya alam, serta strategi komunitas dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya. Catatan lapangan, foto, dan sketsa sederhana digunakan sebagai bagian dari dokumentasi observasi. Ketiga, studi dokumen dilakukan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi kebijakan nasional dan daerah terkait MIFEE dan konservasi, peraturan adat yang berlaku di komunitas setempat, peta wilayah adat, laporan program pemerintah dan perusahaan terkait, laporan LSM, serta artikel atau berita lokal yang relevan. Studi dokumen ini penting untuk memahami kerangka kebijakan, dinamika tata kelola formal dan informal, serta posisi masyarakat adat dalam konteks pembangunan dan konservasi.

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyusun dan memilah data hasil wawancara, observasi, serta studi dokumen ke dalam tema-tema utama seperti transformasi tata kelola masyarakat adat, strategi ketahanan komunitas, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dalam bentuk matriks, tabel, dan narasi deskriptif agar pola-pola yang muncul dapat terlihat secara jelas dan sistematis. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menyusun interpretasi berdasarkan hubungan antar-tema untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, diskusi sejawat guna menguji konsistensi analisis, serta konfirmasi hasil temuan (member check) kepada komunitas adat dan pemangku kepentingan lokal agar hasil penelitian memiliki akurasi, relevansi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan ini diperoleh melalui pendekatan studi kasus kualitatif yang menggali secara mendalam dinamika transformasi tata kelola masyarakat adat di Merauke dalam merespons tekanan kebijakan MIFEE dan konservasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola transformasi, strategi ketahanan komunitas, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada penguatan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Tabel 1. Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat dalam Menghadapi MIFEE dan Kebijakan Konservasi di Merauke

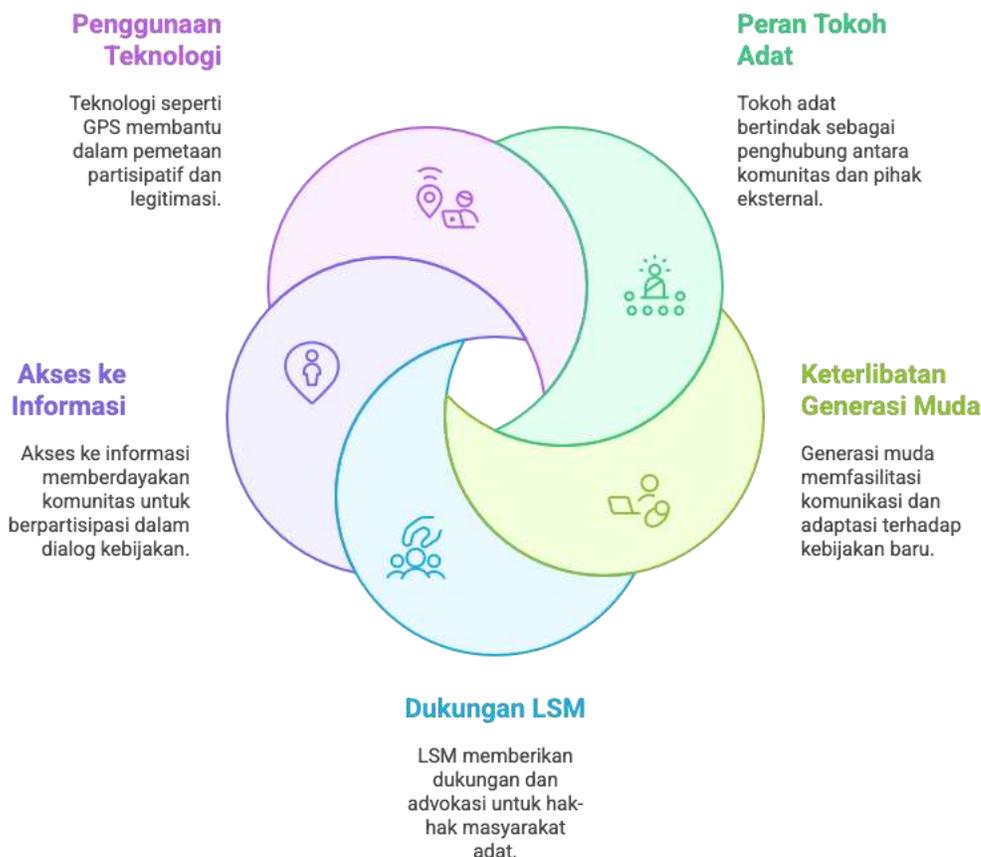
Aspek Tata Kelola	Sebelum MIFEE dan Kebijakan Konservasi	Setelah MIFEE dan Kebijakan Konservasi
Struktur Kepemimpinan	Dominan berbasis kepala suku dan tokoh adat tunggal	Kolaboratif: kepala suku, tokoh adat, generasi muda, dan perwakilan perempuan
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Konsensus dalam lingkup keluarga besar/suku	Musyawarah komunitas diperluas, melibatkan LSM dan perangkat desa
Pengelolaan Wilayah Adat	Tradisional, berbasis hukum adat murni	Integratif: hukum adat, peta partisipatif, dan dokumentasi formal
Hubungan Eksternal	Terbatas, bersifat informal	Terbuka: menjalin komunikasi formal dengan pemerintah dan LSM
Nilai dan Prinsip Tata Kelola	Berorientasi pada tradisi dan warisan leluhur	Sinergi nilai tradisional dengan prinsip tata kelola modern (transparansi, akuntabilitas)

Tabel 1 menyajikan transformasi tata kelola masyarakat adat di Merauke yang terjadi akibat tekanan MIFEE dan kebijakan konservasi. Sebelum intervensi, tata kelola didominasi kepala suku dengan mekanisme keputusan berbasis konsensus keluarga besar dan pengelolaan wilayah sepenuhnya mengikuti hukum adat tradisional. Setelah intervensi, terjadi perubahan signifikan berupa struktur kepemimpinan yang lebih kolaboratif, mekanisme musyawarah yang melibatkan pihak eksternal seperti LSM dan perangkat desa, serta integrasi nilai adat dengan tata kelola modern melalui peta partisipatif dan dokumentasi formal. Transformasi ini memperlihatkan sinergi nilai tradisional dengan prinsip tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel dalam menghadapi dinamika pembangunan dan konservasi.

Tabel 2. Strategi Ketahanan Komunitas Adat dalam Menghadapi MIFEE dan Kebijakan Konservasi di Merauke

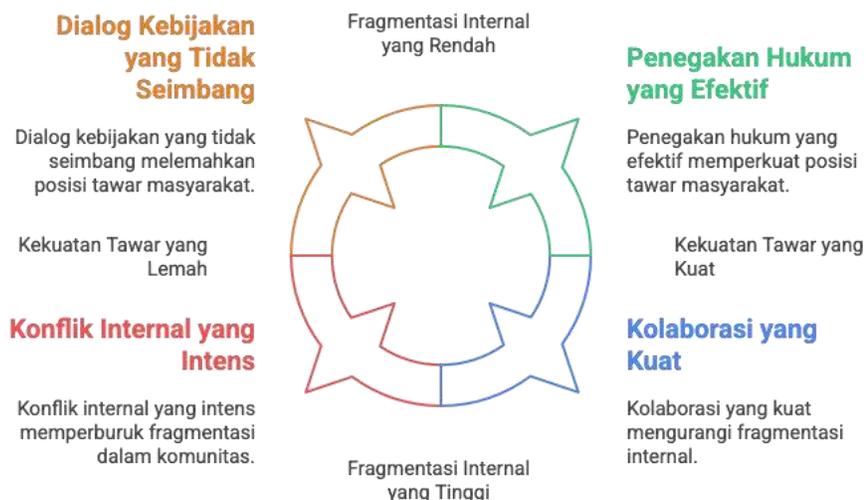
Strategi Ketahanan	Deskripsi Praktik	Contoh Konkret di Lapangan
Diversifikasi Sumber Penghidupan	Kombinasi aktivitas ekonomi tradisional dan inovasi ekonomi baru berbasis potensi lokal.	Berburu satwa liar, meramu sagu, budidaya madu hutan, usaha kerajinan rotan.
Perlawanan Non-Kekerasan	Upaya advokasi, pemetaan wilayah, dan penyampaian aspirasi secara damai melalui berbagai saluran komunikasi.	Penyusunan peta partisipatif wilayah adat, kampanye media sosial, dialog publik.
Revitalisasi Budaya Lokal	Pelestarian nilai dan praktik budaya untuk memperkuat identitas, kohesi sosial, dan legitimasi tata kelola adat.	Pelaksanaan upacara adat, pemeliharaan situs sakral, pendidikan budaya bagi generasi muda.

Tabel 2 menunjukkan berbagai strategi ketahanan yang dikembangkan masyarakat adat di Merauke dalam merespons tekanan MIFEE dan kebijakan konservasi. Strategi tersebut mencakup diversifikasi sumber penghidupan melalui kombinasi aktivitas tradisional, seperti berburu dan meramu, dengan usaha ekonomi baru berbasis potensi hutan non-kayu. Selain itu, komunitas mengadopsi taktik perlawanan non-kekerasan berupa advokasi kebijakan, penyusunan peta wilayah adat secara partisipatif, dan pemanfaatan media untuk menyuarakan aspirasi. Revitalisasi budaya lokal juga menjadi strategi penting dengan menghidupkan kembali ritual adat, melestarikan situs sakral, serta memperkuat pendidikan budaya untuk menjaga identitas dan solidaritas komunitas.



Gambar 1. Faktor pendukung transformasi tata kelola masyarakat adat

Faktor pendukung transformasi tata kelola masyarakat adat di Merauke ditandai oleh peran aktif tokoh adat dan generasi muda yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara komunitas, pemerintah, dan pihak eksternal dalam merespons kebijakan MIFEE dan konservasi. Selain itu, keberhasilan transformasi juga diperkuat oleh adanya pendampingan intensif dari LSM, lembaga penelitian, dan jaringan advokasi yang fokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat. Akses terhadap informasi dan teknologi, seperti pemanfaatan GPS dalam pemetaan partisipatif wilayah adat, turut menjadi elemen penting yang memungkinkan komunitas memperoleh legitimasi dan memperkuat posisi mereka dalam dialog kebijakan.



Gambar 2. Tantangan dalam Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat

Faktor penghambat transformasi tata kelola masyarakat adat di Merauke mencakup ketimpangan kekuatan dalam dialog kebijakan, di mana posisi tawar masyarakat adat jauh lebih lemah dibandingkan pemerintah dan perusahaan pelaksana MIFEE. Selain itu, fragmentasi internal komunitas muncul akibat perbedaan kepentingan antar kelompok adat dan tekanan ekonomi yang memicu konflik horizontal. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah adat dan konservasi semakin memperburuk situasi, sehingga menghambat upaya masyarakat dalam mempertahankan tata kelola berbasis kearifan lokal.

Transformasi tata kelola masyarakat adat di Merauke menunjukkan bagaimana komunitas lokal beradaptasi secara dinamis terhadap tekanan eksternal berupa kebijakan pembangunan pangan (MIFEE) dan program konservasi (Lamonge, 2012). Perubahan ini tercermin dalam pergeseran struktur kelembagaan adat, di mana musyawarah komunitas diperkuat sebagai forum pengambilan keputusan, sementara peran tokoh adat mengalami perluasan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara komunitas, pemerintah, dan aktor non-negara. Mekanisme tata kelola tradisional yang sebelumnya bersifat tertutup kini cenderung terbuka terhadap kolaborasi dengan pihak luar, tanpa sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai budaya yang menjadi landasan pengelolaan wilayah adat (Daga et al., 2022). Adaptasi ini menegaskan bahwa tata kelola masyarakat adat tidak bersifat statis, melainkan mampu mengakomodasi inovasi untuk mempertahankan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis (Rani et al., n.d.).

Jika dibandingkan dengan teori tata kelola berbasis komunitas (community-based governance), temuan ini menunjukkan konsistensi dengan prinsip-prinsip partisipasi kolektif, penguatan kelembagaan lokal, dan kontrol atas sumber daya oleh komunitas itu sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan studi serupa di Papua Nugini dan Kalimantan, di mana masyarakat adat mengadopsi strategi campuran yang memadukan mekanisme tradisional dengan pendekatan kelembagaan modern untuk menghadapi ekspansi agribisnis dan konservasi berbasis negara. Misalnya, di wilayah adat Kalimantan, tata kelola hutan adat dikembangkan melalui skema perhutanan sosial yang tetap mengakui norma lokal namun berbasis regulasi nasional. Demikian pula, masyarakat adat di Asia Tenggara seperti di Filipina dan Malaysia memanfaatkan perangkat hukum dan jaringan advokasi global untuk memperkuat posisi mereka dalam tata kelola sumber daya alam.

Integrasi nilai tradisional dan pendekatan modern dalam pengelolaan wilayah adat di Merauke merepresentasikan bentuk tata kelola hibrid yang mempertemukan norma adat, teknologi modern (seperti pemetaan partisipatif dengan GIS), serta instrumen advokasi kebijakan (Simanihuruk et al., 2023). Model ini mencerminkan kemampuan masyarakat adat untuk menavigasi berbagai rezim kekuasaan sekaligus memelihara identitas budaya sebagai landasan pengelolaan wilayah. Temuan ini mendukung pandangan bahwa keberhasilan tata kelola berbasis komunitas di tengah tekanan pembangunan dan konservasi sangat bergantung pada kapasitas adaptif dan kemampuan komunitas dalam menjalin relasi strategis dengan aktor eksternal. Dengan demikian, transformasi tata kelola masyarakat adat di Merauke tidak hanya menjadi respons pasif atas tekanan eksternal, tetapi juga bentuk proaktif komunitas dalam mempertahankan kedaulatan atas wilayah adatnya (Iswandi, 2023).

Strategi ketahanan komunitas adat di Merauke dalam menghadapi tekanan MIFEE dan kebijakan konservasi menunjukkan kompleksitas adaptasi yang sarat nilai budaya dan kepentingan ekologis. Diversifikasi ekonomi menjadi salah satu strategi utama, di mana komunitas adat tidak hanya menggantungkan hidup pada praktik tradisional berburu, meramu, dan bertani ladang, tetapi mulai mengembangkan usaha kecil berbasis potensi lokal seperti produk hutan non-kayu dan kerajinan tangan. Diversifikasi ini mencerminkan upaya komunitas untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya dan memperkuat kemandirian ekonomi di tengah keterbatasan akses lahan akibat perluasan kawasan industri dan konservasi (Muhamad, 2023). Namun, strategi ini menghadapi tantangan berupa terbatasnya akses pasar, dukungan modal, dan kebijakan yang mendukung ekonomi berbasis komunitas.

Selain diversifikasi ekonomi, perlawanan non-kekerasan menjadi bentuk lain dari ketahanan yang ditunjukkan melalui advokasi, penyusunan peta wilayah adat partisipatif, serta penggunaan media lokal dan nasional untuk menyuarakan hak-hak masyarakat. Pendekatan ini bukan hanya menegaskan posisi komunitas sebagai subjek pembangunan, tetapi juga memperkuat legitimasi klaim atas wilayah adat di hadapan negara dan perusahaan. Meski demikian, efektivitas perlawanan non-kekerasan seringkali terhambat oleh asimetri kekuasaan dalam dialog kebijakan, lemahnya perlindungan hukum formal, serta risiko kriminalisasi terhadap tokoh adat yang vokal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa strategi ketahanan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan hukum yang membatasi ruang gerak masyarakat adat (Sakapaji et al., 2024).

Revitalisasi budaya lokal juga menjadi pilar penting dalam strategi ketahanan, yang tercermin dalam upaya menghidupkan kembali ritual adat, menjaga situs-situs sakral, dan memperkuat identitas kolektif komunitas (Tambaip et al., 2023b). Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial internal, tetapi juga sebagai bentuk resistensi kultural terhadap homogenisasi nilai akibat proyek pembangunan berskala besar. Revitalisasi budaya ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekologi, karena nilai-nilai adat yang dihidupkan kembali cenderung mengandung prinsip konservasi dan penghormatan terhadap alam. Namun, upaya ini kerap menghadapi tantangan berupa infiltrasi nilai-nilai baru yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan, serta fragmentasi komunitas akibat perbedaan kepentingan.

Hubungan antara strategi ketahanan komunitas, keberlanjutan ekologi, dan identitas budaya menunjukkan bahwa ketiganya saling terkait dan saling memperkuat. Ketahanan komunitas yang dibangun melalui diversifikasi ekonomi, perlawanan non-kekerasan, dan revitalisasi budaya mendukung terciptanya tata kelola berbasis kearifan lokal yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan (Tambaip et al., 2023a). Di sisi lain, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada keberlanjutan identitas budaya dan solidaritas komunitas dalam menghadapi tekanan eksternal. Oleh karena itu, strategi ketahanan komunitas adat di Merauke tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya pragmatis untuk bertahan, tetapi sebagai bagian dari

proses transformasi tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dan pengakuan hak atas wilayah adat.

Faktor internal dan eksternal memainkan peran krusial dalam mendukung keberhasilan transformasi tata kelola masyarakat adat di Merauke dalam menghadapi tekanan kebijakan MIFEE dan konservasi. Solidaritas komunitas yang terbangun melalui ikatan kekerabatan, nilai gotong royong, dan mekanisme musyawarah adat menjadi fondasi utama dalam memperkuat kohesi sosial. Peran tokoh adat dan generasi muda juga terbukti signifikan, terutama dalam menjembatani komunikasi antara komunitas, pemerintah, dan aktor eksternal. Generasi muda, misalnya, berperan sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan teknologi untuk pemetaan wilayah adat dan dokumentasi praktik budaya (Tjilen, Tambaip, et al., 2023). Dukungan dari organisasi non-pemerintah (LSM) serta akses terhadap teknologi, seperti penggunaan GPS dan aplikasi pemetaan partisipatif, semakin memperkuat kapasitas komunitas untuk mempertahankan wilayah adat mereka secara lebih strategis dan terstruktur.

Namun demikian, transformasi tata kelola ini tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural yang membatasi efektivitas adaptasi masyarakat adat. Salah satu hambatan utama adalah asimetri kekuasaan yang terjadi dalam dialog kebijakan, di mana posisi tawar masyarakat adat seringkali dilemahkan oleh dominasi aktor negara dan korporasi. Situasi ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat, termasuk pengabaian terhadap wilayah adat yang telah dipetakan secara partisipatif. Fragmentasi sosial di internal komunitas, yang muncul akibat perbedaan kepentingan atau pengaruh eksternal seperti janji kompensasi ekonomi dari perusahaan, juga menjadi tantangan serius dalam menjaga konsolidasi kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal komunitas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konfigurasi relasi kuasa di tingkat lokal hingga nasional (Tjilen et al., 2024).

Temuan ini menguatkan literatur tentang tata kelola masyarakat adat dan hak atas tanah yang menekankan pentingnya sinergi antara kekuatan internal komunitas dan dukungan eksternal yang berpihak pada keadilan sosial. Studi ini juga menegaskan bahwa tata kelola adaptif memerlukan pengakuan formal atas hak-hak masyarakat adat, disertai dengan skema kolaborasi yang setara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal, serta menawarkan perspektif baru bagi kajian-kajian tentang transformasi tata kelola di wilayah adat yang menghadapi tekanan pembangunan berskala besar (Tjilen, Waas, et al., 2023).

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan dan konservasi yang mengakui serta melibatkan tata kelola adat sebagai mitra sejajar dalam perencanaan dan implementasi program. Kebijakan yang hanya menempatkan masyarakat adat sebagai objek pembangunan terbukti rentan menimbulkan konflik, resistensi sosial, dan kegagalan tujuan konservasi maupun pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengakuan formal atas struktur kelembagaan adat dan mekanisme musyawarah komunitas menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan kebijakan di tingkat lokal. Temuan ini mendukung literatur sebelumnya yang menekankan peran penting tata kelola berbasis komunitas dalam mitigasi dampak kebijakan pembangunan skala besar terhadap masyarakat rentan, termasuk masyarakat adat (Tambaip et al., 2023a).

Penelitian ini juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun model kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan aktor non-negara, seperti LSM dan akademisi, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah adat. Model kolaborasi yang ditemukan di Merauke mencerminkan adanya ruang dialog yang terbuka dan saling menghargai antara pihak-pihak tersebut, meskipun masih

dihadapkan pada tantangan asimetri kekuasaan dan lemahnya dukungan regulasi. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi masyarakat adat dalam negosiasi kebijakan, tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan perlindungan wilayah adat melalui penyusunan regulasi yang jelas terkait pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, baik dari sisi manajemen tata kelola, kemampuan advokasi, maupun akses terhadap teknologi dan informasi. Dengan demikian, masyarakat adat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika kebijakan pembangunan dan konservasi di wilayahnya. Relevansi temuan ini memperkaya literatur tentang tata kelola masyarakat adat dan hak atas tanah, terutama dalam konteks pembangunan kawasan strategis yang sarat kepentingan politik dan ekonomi, seperti Merauke. Temuan ini juga membuka peluang untuk pengembangan model tata kelola adaptif yang dapat direplikasi di wilayah adat lainnya di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman teori ketahanan komunitas dan tata kelola adaptif, khususnya dalam konteks masyarakat adat yang menghadapi tekanan kebijakan pembangunan dan konservasi secara simultan. Hasil studi menunjukkan bagaimana masyarakat adat Merauke mampu membangun strategi ketahanan yang bersumber dari integrasi nilai-nilai budaya lokal dengan pendekatan tata kelola modern, sehingga memperkuat kapasitas adaptif mereka terhadap perubahan struktural dan ekologis. Model tata kelola yang terbentuk—berbasis musyawarah komunitas, kolaborasi lintas aktor, serta pemanfaatan teknologi sederhana—memiliki potensi untuk direplikasi atau diadaptasi pada konteks masyarakat adat lainnya di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik yang mengalami dinamika serupa, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan politik setempat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Merauke mengalami transformasi tata kelola yang signifikan sebagai respons terhadap tekanan kebijakan MIFEE dan program konservasi. Transformasi tersebut tercermin dalam penguatan lembaga adat, revitalisasi musyawarah komunitas, serta integrasi nilai-nilai tradisional dengan pendekatan tata kelola modern. Masyarakat adat mengembangkan berbagai strategi ketahanan, mulai dari diversifikasi sumber penghidupan, advokasi kebijakan, hingga penguatan identitas budaya sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan dan adaptasi. Faktor pendukung utama transformasi ini adalah peran aktif tokoh adat, generasi muda, dukungan LSM, dan pemanfaatan teknologi, sementara hambatannya mencakup ketimpangan kekuatan dalam dialog kebijakan, lemahnya penegakan hukum, dan fragmentasi internal komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan pembangunan dan konservasi yang lebih inklusif, mengakui tata kelola adat sebagai mitra sejajar, serta memperkuat kapasitas kelembagaan lokal untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Daga, E., Asprino, L., Damiano, R., Daquino, M., Agudo, B. D., Gangemi, A., Kuflik, T., Lieto, A., Maguire, M., & Marras, A. M. (2022). Integrating citizen experiences in cultural heritage archives: requirements, state of the art, and challenges. *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage*

- (JOCCH), 15(1), 1–35.
- Dagani, G. (2024). PERAN BUDAYA LOKAL TERHADAP PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING. *Journal Publicuho*, 7(4), 1842–1854.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., & Qomariyah, P. (2014). Desa membangun Indonesia. *Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Fenetiruma, O. A., Hutabarat, M., Palinggi, Y., Sumule, A., Waromi, J., Holle, Y., Tjolli, I., Yuminarti, U., Matualage, A., & Sagrim, M. (2022). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Papua*. Penerbit Andi.
- Iswandi, K. (2023). Increasing Political Participation and Capacity of Indigenous Papuans: Encouraging Adaptive Collaborative Governance. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 13(2), 294–317.
- Lamonge, M. (2012). Neo-liberalism, Social Conflict and Identity of Papuan Indigenous People Case study of Merauke Integrated Food & Energy Estate (MIFEE) in Papua. *International Institute of Social Studies*.
- Maulana, A., & Hutagalung, H. (2025). Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 245–256.
- McDonnell, J. E. (2022). The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim. In *The Genocide-Ecocide Nexus* (pp. 102–123). Routledge.
- Muhamad, G. M. (2023). Economic diversification to reduce natural resource dependency in the literature. In *Reducing Natural Resource Dependency for Economic Growth in Resource Rich Countries* (pp. 15–53). Springer.
- Purnomo, E. P., Khairunnisa, T., Prabawa, W. G., Lestari, R., Irawan, I., & Sohsan, I. (2024). *Community For Sustainable Development “Strategi Dan Tatakelola Baru Yang Berkelanjutan Bagi Pembangunan Daerah Melalui Komunitas.”* TOHAR MEDIA.
- Rani, J., Gulia, V., Sangwan, A., Dhull, S. S., & Mandzheeva, S. (n.d.). Synergies of Traditional Ecological Knowledge in Biodiversity Conservation: A Paradigm for Sustainable Food Security. *Ecologically Mediated Development*, 27.
- Rumkabu, E., Amenes, A. A., Elisabeth, A., & Suryawan, I. N. (2023). *Merebut kendali kehidupan: perjuangan orang Wambon di Boven Digoel menghadapi serbuan investasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sakapaji, S. C., García Molinos, J., Parilova, V., Gavriyeva, T., & Yakovleva, N. (2024). Navigating legal and regulatory frameworks to achieve the resilience and sustainability of indigenous socioecological systems. *Resources*, 13(4), 56.
- Simanihuruk, M., Ismail, R., Sitorus, H., & Zuska, F. (2023). Negotiating Tradition and Modernity: A Case Study of Hybrid Political Cultures in Village Governance, North Tapanuli, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 18(12).
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023a). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 97–106.
- Tambaip, B., Tjilen, A. P., & Ohoiwutun, Y. (2023b). Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)*, 5(1), 1–9.
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., Dharmawan, B., Adrianus, A., Riyanto, P., & Ohoiwutun, Y. (2024). Engaging stakeholders in policy decision-making for food security governance: Identification, perception, and contribution. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 8(1), 144–154. <https://doi.org/10.22495/cgobrv8i1p12>
- Tjilen, A. P., Tambaip, B., Waas, R. F. Y., Moento, P. A., & Purnama, E. N. (2023). Penguatan Masyarakat Melalui Pengorganisasian Dan Peningkatan Organisasi PKK Dalam Memanfaatkan Limbah Sawit. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 257–262.
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani,

- R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.
- Tryatmoko, M. W. (2012). Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 269–296.
- Van Kerkhoff, L., & Pilbeam, V. (2017). Understanding socio-cultural dimensions of environmental decision-making: A knowledge governance approach. *Environmental Science & Policy*, 73, 29–37.